

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan Daerah

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
2025**



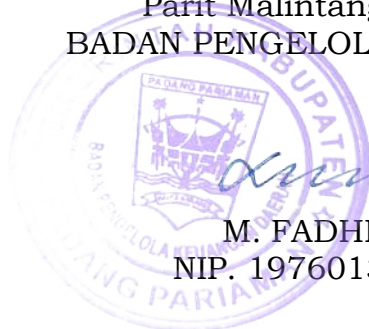
BPKD
PADANG PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai agenda *refocusing* dan efisiensi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Meskipun demikian BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Parit Malintang, 14 Januari 2026
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



[Signature]
M. FADHLY S, AP.,M.M
NIP. 19760130 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR	TABEL
.....	3
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	5
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	8
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Pengukuran Kinerja	20
3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama	21
3.3 Realisasi Anggaran	111
BAB IV PENUTUP	116
LAMPIRAN	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	5
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	9
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun n	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	13
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	14
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	21
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Tahun 2025	23
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Sasaran 1	25
Tabel 3.4	Indikator dan Capaian Kinerja dari Sasaran 1	26
Tabel 3.5	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Lalu	29
Tabel 3.6	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	30
Tabel 3.7	Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Periode 2009 s/d 2025	30
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	32
Tabel 3.9	Analisis Keberhasilan dan Solusi	47
Tabel 3.10	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	48
Tabel 3.11	Program dan Kegiatan Sasaran 2	56
Tabel 3.12	Indikator dan Capaian Kinerja dari Sasaran 2	56
Tabel 3.13	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Lalu	57

Tabel 3.14 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	59
Tabel 3.15 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	60
Tabel 3.16 Analisis Keberhasilan dan Solusi	69
Tabel 3.17 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	70
Tabel 3.18 Program dan Kegiatan Sasaran 3	74
Tabel 3.19 Indikator dan Capaian Kinerja dari Sasaran 3	75
Tabel 3.20 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Lalu	77
Tabel 3.21 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalamM Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	78
Tabel 3.22 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	79
Tabel 3.23 Analisis Keberhasilan dan Solusi	89
Tabel 3.24 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	90
Tabel 3.25 Program dan Kegiatan Sasaran 4	94
Tabel 3.26 Indikator dan Capaian Kinerja dari Sasaran 4	95
Tabel 3.27 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Lalu	97
Tabel 3.28 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	98
Tabel 3.29 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	99
Tabel 3.30 Analisis Keberhasilan dan Solusi	108
Tabel 3.31 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	109
Tabel 3.32 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	4
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi

kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabuapten Padang Pariaman, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH mempunyai tugas :

“ Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah “

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH mempunyai fungsi :

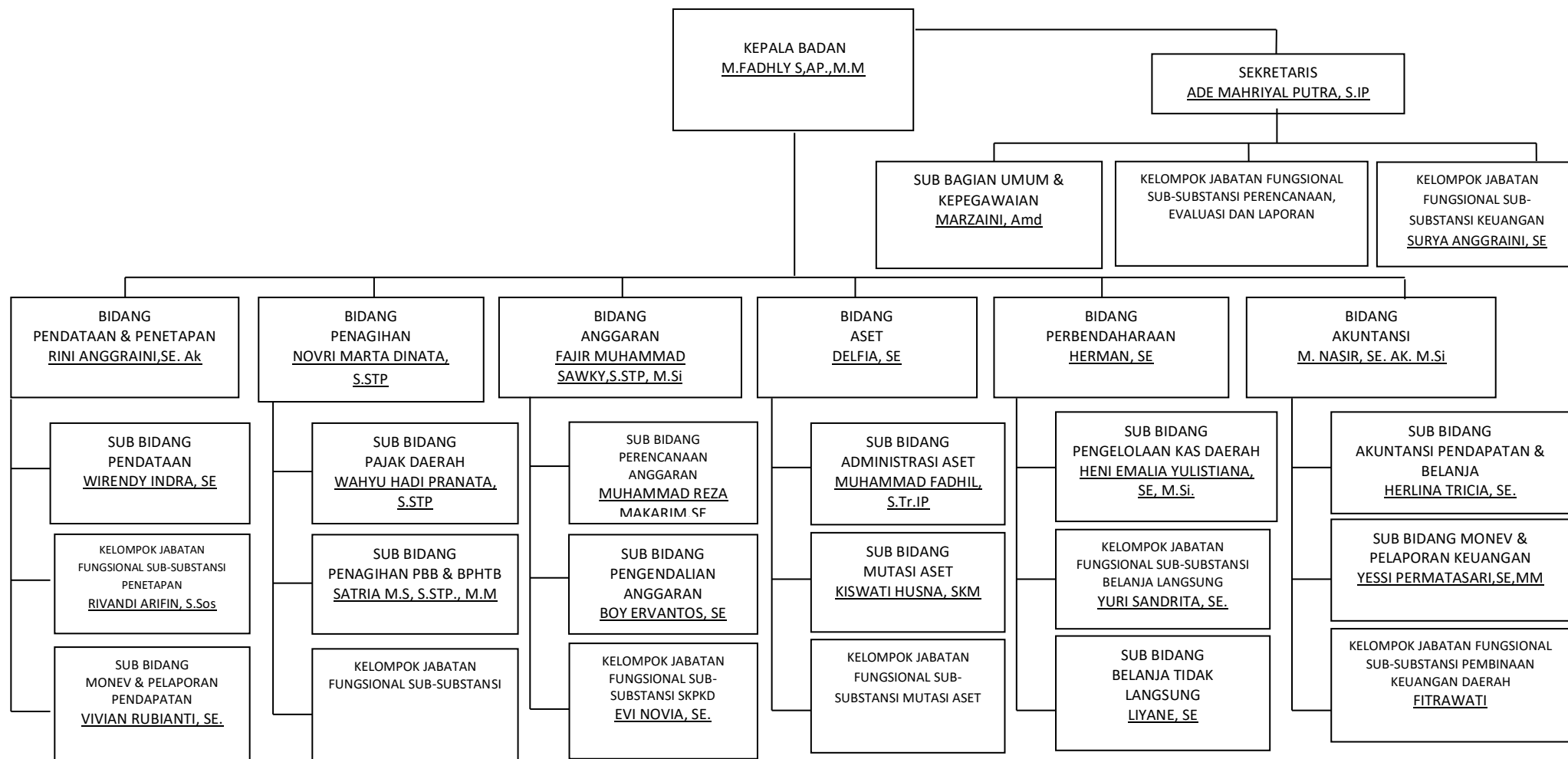
1. Penyusunan perencanaan bidang keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
3. Penyelenggara Urusan pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

- a. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis badan;
- d. perumusan kebijakan umum bidang Keuangan;
- e. pengendalian pelaksanaan urusan Keuangan dalam rangka mencapai target kinerja badan;
- f. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- h. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan;
- i. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- j. koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH. Berikut bagan struktur organisasi BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



1.2.2 Anggaran

Anggaran yang dimiliki oleh BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH pada tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2024	Rp 219.435.489.568
APBD	Tahun 2025	Rp 220.143.049.131

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2024 dan Penetapan APBD Pergeseran Setelah APBD Perubahan 2025

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi

disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
RENSTRA BPKD 2021-2026							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Penyelenggaraa n Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0
	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	0	0	0
	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	0	0	0	80.50 (A)	80,70 (A)
	Meningkatkan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	5	5.5	6	6.5	7
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
RENSTRA BPKD 2025-2029							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, Meningkatkan Kualitas Tata	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan APBD	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah	94,225	94,226	94,228	94,229	94,224
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40

Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,70 (A)	80,78 (A)	80,8 2 (A)	80,86 (A)	80,90 (A)
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase penerimaan PAD terhadap target	91,182	91,18 6	91,1 89	91,18 8	91,18 7
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.51	0.53	0,55	0,57	0,59

Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2021-2026 untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke 5 (lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan”.

Sedangkan untuk Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2025-2029 untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke1 (satu) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel diatas.

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
			Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
IKU 2021-2026					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	jumlah	Salah satu upaya yang dilakukan untuk meraih kembali opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan	Lembar Hasil Pemeriksaa n (LHP) BPK RI

			Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan Menindaklanjuti Temuan BPK RI	Keuangan Daerah	
Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	jumlah	Dalam upaya peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) diperlukannya pencatatan BMD yang akurat, pemanfaatan BMD dengan tepat dan pengelolaan BMD yang tertib	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	nilai	Upaya Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dengan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja agar mencapai predikat nilai terbaik dalam pengelolaan Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BPKD
Meningkatkan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	persentase	Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah diperlukannya pendataan dan penetapan objek pajak di wilayah Kabupaten/Kota	realisasi tahun n-1/realisasi tahun n-1	BPKD
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
			Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
IKU BPKD 2025-2029					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan APBD	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah	persentase	Pengendalian keuangan daerah adalah serangkaian tindakan dan proses yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Realisasi anggaran/ target anggaran x 100%	Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Bidang anggaran
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah	Indeks pengelolaan barang milik daerah	angka	Indeks pengelolaan barang milik daerah adalah suatu ukuran kinerja pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang digunakan untuk menilai	Rentang nilai berkisar antara 1 hingga 4, dengan penjelasan sebagai	Bidang aset

			efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMD dalam suatu daerah	berikut : 1 (buruk), 2 (cukup), 3 (baik), 4 (sangat baik)	
Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	Upaya meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja agar mencapai predikat nilai terbaik dalam pengelolaan Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BPKD
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Penerimaan PAD terhadap Target	persentase	Efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatannya. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa target tercapai dengan baik, sementara persentase yang rendah bisa menjadi indikasi perlunya perbaikan dalam pengelolaan PAD	Realisasi PAD/ Target PAD x 100%	Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Bidang pendataan dan penetapan, Bidang penagihan
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	angka	Indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah	Total penerimaan pajak pemerintah daerah/ produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku x 100%	Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Bidang pendataan dan penetapan, Bidang penagihan

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2025 :

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
RENSTRA BPKD 2021-2026						
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.5.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1.5.6.1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	jumlah	0
1.5.2		1.5.4.2	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	jumlah	0
1.5.2		1.5.4.3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	nilai	80,70 (A)
1.5.2		1.5.2.4	Meningkatkan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	prosentase	7
No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
RENSTRA BPKD 2025-2029						
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan	1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan APBD	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah	Persentase	94,225
		2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah	Indeks pengelolaan barang milik daerah	angka	2,00

	Pemerintahan Daerah, Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	3	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	80,70 (A)
		4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Penerimaan PAD terhadap Target	Persentase	91,182
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	angka	0,51

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SASARAN STRATEGIS 2021-2026			
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.2.1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	0

1.5.2.2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0
1.5.2.3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	80,70 (A)
1.5.2.4	Meningkatkan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	7
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SASARAN STRATEGIS 2025-2029			
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.2.1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan APBD	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah	94,225
1.5.2.2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah	Indeks pengelolaan barang milik daerah	2,00
1.5.2.3	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,70 (A)
1.5.2.4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Penerimaan PAD terhadap Target	91,182
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,51

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.2.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Anggaran tepat waktu	30 November 2025
1.5.2.1.1		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %
1.5.2.1.1		Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100 %
1.5.2.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan APBD Tepat Waktu	4 Dokumen
1.5.2.1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen
1.5.2.1.1.1.2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 OPD
1.5.2.1.1.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 OPD
1.5.2.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen
1.5.2.1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen
1.5.2.1.1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan perbendaharaan yang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	10400 Dokumen
1.5.2.1.1.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen
1.5.2.1.1.2.4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen
1.5.2.1.1.2.10	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	205 Orang
1.5.2.1.1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	6 Dokumen
1.5.2.1.1.3.1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan
1.5.2.1.1.3.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	46 Laporan
1.5.2.1.1.3.3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
1.5.2.1.1.3.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen
1.5.2.1.1.3.5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen
1.5.2.1.1.3.6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	547 Orang
1.5.2.1.1.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen penyaluran keuangan daerah	5 Dokumen
1.5.2.1.1.4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan
1.5.2.1.1.4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan
1.5.2.1.1.4.3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan
1.5.2.1.1.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen dan Data Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	44 Dokumen
1.5.2.1.1.5.1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	44 Dokumen
1.5.2.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	100 %
1.5.2.2.1		Persentase BMD yang Termanfaatkan dengan Tepat	100 %
1.5.2.2.1		Persentase BMD yang Tertib	100 %
1.5.2.2.1.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tertib dan tepat waktu	1 Laporan
1.5.2.2.1.1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.2.2.1.1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
1.5.2.2.1.1.3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan
1.5.2.2.1.1.4	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan
1.5.2.2.1.1.5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen
1.5.2.2.1.1.6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	556 Laporan
1.5.2.2.1.1.7	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang
1.5.2.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100 %
1.5.2.3.1		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 %
1.5.2.3.1		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88.50
1.5.2.3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	3 Dokumen
1.5.2.3.1.1		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan
1.5.2.3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
1.5.2.3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan
1.5.2.3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	2 Laporan
1.5.2.3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan
1.5.2.3.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.2.3.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	39 Orang
1.5.2.3.1.5		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	39 Orang
1.5.2.3.1.5		Jumlah SKP ASN	39 Orang
1.5.2.3.1.5		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	39 Orang
1.5.2.3.1.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket
1.5.2.3.1.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang
1.5.2.3.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	3 Dokumen
1.5.2.3.1.6		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	3 Dokumen
1.5.2.3.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
1.5.2.3.1.6.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
1.5.2.3.1.6.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
1.5.2.3.1.6.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
1.5.2.3.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	20 Unit
1.5.2.3.1.7.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit
1.5.2.3.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	2 Dokumen
1.5.2.3.1.8		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	2 Dokumen
1.5.2.3.1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
1.5.2.3.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
1.5.2.3.1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1.5.2.3.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	10 Unit
1.5.2.3.1.9		Jumlah total nilai aset	20 Unit
1.5.2.3.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit
1.5.2.3.1.9.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
1.5.2.3.1.9.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit
1.5.2.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD	95 %
1.5.2.4.1		Persentase Pencapaian Target PAD	100 %
1.5.2.4.1.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak	1 Dokumen
1.5.2.4.1.1		Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen
1.5.2.4.1.1.1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen
1.5.2.4.1.1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	33 Laporan
1.5.2.4.1.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit
1.5.2.4.1.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan
1.5.2.4.1.1.5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10 Objek Pajak
1.5.2.4.1.1.6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen
1.5.2.4.1.1.7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.2.4.1.1.8	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7 Dokumen
1.5.2.4.1.1.9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	7 Dokumen
1.5.2.4.1.1.10	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun rumus pengukuran kinerja tersebut sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{kinerja}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara ***Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri*** dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.3

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

3.2 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerja guna

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang ditetapkan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja. Efisiensi anggaran adalah selisih persentase realisasi anggaran ketika kinerja tercapai 100% atau lebih. Efisiensi kinerja adalah selisih antara capaian kinerja dengan capaian 100% target kinerja. Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan jumlah dari efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Tahun 2025

N o	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisa si	Persentas e	Interpretas i
IKU 2021-2026							
1.	Meningkatka n Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Temuan	0	0	100	Berhasil
2.	Meningkatka n Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaa n BMD	Jumlah Temuan	0	0	100	Berhasil
3.	Meningkatka n Akuntabilita s dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	A(80.70)	A(80.15)	99,31	Berhasil
4.	Meningkatka n Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkata n Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentas e	7%	19,85%	283,5	Sangat Berhasil
N o	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisa si	Persentas e	Interpretas i
IKU 2025-2029							
1.	Meningkatny a akuntabilitas pengelolaan APBD	Persentase Capaian Akuntabilit as Pengendali an Keuangan Daerah	Persentas e	94,225	93,488*	99,21*	Berhasil
2.	Meningkatny a akuntabilitas pengelolaan aset daerah	Indeks pengelolaa n barang milik daerah	Angka	2,00	2,00*	100*	Berhasil
3.	Meningkatny a Transparansi dan akuntabilitas penyelenggar aan pemerintah daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A(80.70)	A(80.15)	99,31	Berhasil

4.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Penerimaan PAD terhadap Target	Persentase	91,182 %	98,52*	108,05*	Sangat Berhasil
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Angka	0,51	0,31*	60,78	Rendah

	Sasaran 1 (Renstra 2021-2026) Meningkatkan Kualitas Pengelola Keuangan Daerah
	Sasaran 1 (Renstra 2025-2029) Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan APBD

Sasaran 1 (satu) dalam Renstra 2021-2026 ini merupakan salah satu upaya mewujudkan tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yang terletak pada Misi V, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan. Selanjutnya tujuan tersebut dicapai dengan salah satu sasaran pada RPJMD dan merupakan tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2021-2026, yaitu: Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel dengan indikator sasaran yaitu Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah. Adapun formulasi untuk mengukur capaian realisasi indikator kinerja utama yakni :

Formulasi pengukuran : Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD

Sedangkan Sasaran 1 (satu) pada Renstra 2025-2029 ini merupakan salah satu upaya mewujudkan tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yang terletak pada Misi I, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas. Selanjutnya tujuan tersebut dicapai dengan salah satu sasaran pada RPJMD dan merupakan tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2025-2029, yaitu: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Adapun formulasi untuk mengukur capaian realisasi indikator kinerja utama yakni :

Formulasi pengukuran : $\text{Realisasi Anggaran} / \text{Target Anggaran} \times 100\%$

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Sasaran 1

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%
		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100%
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

Tabel 3.4
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian 2025			interpretasi
	Target	Realisasi	%	
IKU 2021-2026				
Persentase Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	0	0	100	Sangat berhasil
Indikator Kinerja	Capaian 2025			interpretasi
	Target	Realisasi	%	
IKU 2025-2029				
Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah	94,225	93,488*	99,21*	berhasil

Sebagaimana terlihat pada tabel 3.4 tentang pengukuran capaian sasaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2025 capaian sasaran kinerja sangat berhasil dengan tidak adanya temuan BPK yang material terhadap laporan keuangan daerah yang dibuktikan dengan diperolehnya Opini WTP oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atas LKPD tahun anggaran 2024.

Adapun kriteria yang dijadikan perhatian BPK dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP).
2. Kecukupan Pengungkapan.
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping keempat kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material uncertainties*), pengelolaan atas *cash flow* dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya material.

Terkait dengan penilaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sudah mengatur tentang jenis opini yang diberikan sebagai salah satu bentuk hasil audit atas laporan keuangan Daerah yang terdiri atas :

1. Wajar Tanpa Pengecualian / WTP (*Unqualified Opinion*)
2. Wajar dengan Pengecualian / WDP (*Qualified Opinion*)
3. Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
4. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil penilaian kerja setiap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang diamanatkan kepadanya, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menjelaskan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.

Opini LKPD ini menjadi ukuran penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan yang baik terhadap opini LKPD ini dari tahun ke tahun menjadi penting dari kondusifnya pemerintahan daerah yang sedang berlangsung. Tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bisa saja berbeda antar entitas pemerintah daerah

yang satu dengan entitas pemerintah daerah lainnya, tergantung kualitas SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, luasan wilayah, serta kompleksitas permasalahan yang ada di daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam urusan penunjang dibidang keuangan telah melakukan berbagai strategi dalam pengelolaan keuangan daerah, Sehingga pada tahun 2024 Kabupaten Padang Pariaman melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Opini ini tertuang dalam LHP BPK RI Nomor 64/S-HP/XVIII.PDG/05/2025 tentang Hasil Pemeriksaaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 pada tanggal 22 Mei 2025. Sedangkan untuk kinerja tahun anggaran 2025 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemerikas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Sedangkan untuk indikator kinerja Tahun 2025-2029 sebagaimana terlihat pada tabel diatas tentang pengukuran capaian sasaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2025 capaian sasaran kinerja berhasil dengan realisasi capaian 99,21%*, angka capaian pada indikator ini bersifat sementara karena LKPD 2025 yang masih dalam proses penyusunan.

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Pada tabel berikut, untuk capaian IKU Tahun 2021-2026 bisa dilihat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2022-2025 berhasil direalisasikan setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Opini WTP yang menjadi salah satu tujuan jangka menengah ataupun jangka pendek/tahunan diraih dengan mengupayakan beberapa strategi dan inovasi yang mendukung tercapainya program dan kegiatan.

Tabel 3.5
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun 2025 dan tahun lalu;

N O	INDIKATO R	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targe t	Realisa si
IKU 2021-2026									
1	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0
N O	INDIKATO R	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targe t	Realisa si
IKU 2025-2029									
1	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah	-	93,389	-	93,314	-	94,220	94,225	93,488*

Sedangkan untuk capaian IKU Tahun 2025-2029 pada tabel diatas, pada Tahun 2022-2024 interpretasi realisasi capaian berhasil, walaupun pada tahun-tahun tersebut belum memiliki target. Pada tahun 2025 realisasi capaian belum mencapai target yang ditetapkan, realisasi capaian pada Tahun 2025 ini masih bersifat sementara.

c). Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.6

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IKU 2021-2026																	
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Temuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		83,3	Berhasil
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
IKU 2025-2029																	
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan APBD	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah	persentase	94,25	94,226	94,228	94,229	94,224	94,226	93,488*	0	0	0	0		16,53*	Berhasil

Perkembangan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Padang Pariaman bisa dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.7

Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Periode 2009 s/d 2025

NO	LKPD TAHUN	OPINI
1.	2009	WDP
2.	2010	WDP
3.	2011	WDP

4.	2012	WDP
5.	2013	WTP
6.	2014	WTP
7.	2015	WTP
8.	2016	WTP
9.	2017	WTP
10.	2018	WDP
11.	2019	WTP
12.	2020	WTP
13.	2021	WTP
14.	2022	WTP
15.	2023	WTP
16.	2024	WTP
17.	2025	WTP***

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meraih kembali opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti Temuan BPK RI
2. Peningkatan Peran APIP
3. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Keuangan Daerah
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi
5. Koordinasi yang baik antara unit terkait baik internal maupun eksternal
6. Deteksi dini potensi permasalahan yang dapat menjadi temuan pemeriksaan

D) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
IKU 2021-2026							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5.2.1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	0	0	100	1. Menindaklanjuti temuan BPK RI 2. Pemanfaatan dan Implementasi SIPD dengan maksimal 3. Percepatan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah dengan melakukan rekon secara intens 4. Komitmen dalam dengan SKPD penyusunan LK tepat waktu 5. Koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (<i>money follow result</i>) dengan melakukan verifikasi RKA 6. Menyusun surat edaran tentang Batasan pencairan dan percepatan penyelesaian pencairan 7. Kerjasama yang baik dengan Bank Nagari	1. Deteksi dini potensi permasalahan yang dapat menjadi temuan pemeriksaan 2. Sosialisasi terkait regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan 8. Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan 3. Perlunya Management Kas Ketat 4. Pengoptimalan implementasi SIPD 5. Peningkatan kesepahaman tujuan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1.5.2.1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan APBD	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah	94,225	93,488*	99,21*	1. Penerapan SPIP yang efektif 2. Sistem informasi keuangan terintegrasi 3. Tindak lanjut rekomendasi audit	1. Mengelola perencanaan dan penganggaran secara transparan 2. Melaksanakan pengendalian internal keuangan 3. Menyusun laporan keuangan sesuai standar 4. Memperoleh opini audit yang baik
---------	---	---	--------	---------	--------	---	---

E) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 2021-2026								
1.5.2.1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	100	203.560.166.909	188.911.596.381	92,80	14.648.570.528
No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 2025-2029								
1.5.2.1	Meningkatnya akuntabilitas	94,225	93,488*	99,21*	203.560.166.909	188.911.596.381	92,80	14.648.570.528

	pengelolaan APBD							
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : LRA BPKD Tahun 2025

Dalam sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah tercapai realisasi Rp. 188.911.596.381 dengan target Rp 203.560.166.909 atau sebesar 92.80%.

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100%-92,80% = 7,2%
Total efisiensi	:	0% + 7,2% = 7,2%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **7,2%** dengan capaian kinerja berdasarkan hasil opini BPK RI Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/100%)sesuai dengan yang tertuang dalam LHP BPK RI Nomor 64/S-HP/XVIII.PDG/05/2025 tentang Hasil Pemeriksaaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 pada tanggal 22 Mei 2025 dengan pengurangnya adalah persentase capaian realiasasi anggaran adalah 92,80%.

Dalam sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan APBD kualitas pengelolaan keuangan daerah tercapai realisasi Rp. 188.911.596.381 dengan target Rp 203.560.166.909 atau sebesar 92.80%.

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	99,21% - 100% = -0,79%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100%-92,80% = 7,2%

Total efisiensi	:	-0,79% + 7,2% = 6,41%
------------------------	----------	------------------------------

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **6,41%** dengan capaian kinerja berdasarkan perhitungan rumus pada indikator Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah -0,79 dan persentase capaian realisasi anggaran adalah 97.75%.

1. Opini WTP atas LKPD Tahun 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT Jl. Khalib Sulaiman No. 34 Telp. (0751) 40811 Fax (0751) 40811 Padang 25137 Nomor : 64/S-HP/XVIII.PDG/05/2025 Lampiran : 1 (satu berkas) Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Padang, 22 Mei 2025 Kepada Yth. Bupati Padang Pariaman Di Parit Malintang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Polak-palak hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut. Opini atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualan. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain: - Penganggaran Pendapatan Asli Daerah Tidak Terukur Secara Rasional dan Manajemen Kas Daerah Tidak Terib; - Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai; dan - Pengelolaan Piutang PBB P2 Belum Memadai dan Nilai Piutang PBB P2 Tidak Akurat. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kabupaten Padang Pariaman antara lain agar: - Memerintahkan Kepala BPKD selaku BUD untuk melaksanakan manajemen kas sesuai ketentuan, melakukan pengawasan dan pengendalian anggaran, serta memperhatikan anggaran yang sudah ditentukan peruntukannya; - Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam upaya memperoleh kompensasi dan kejelasan status aset tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan tol; dan - Memerintahkan Kepala BPKD untuk Melakukan verifikasi dan validasi data piutang PBB P2 yang belum akurat.	Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 28.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 28.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 masing-masing bertanggal 21 Mei 2025. Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Atas perhatian dan kerja sama Bupati Padang Pariaman, kami ucapkan terima kasih. Kepala BPK Perwakilan, Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFRA.
--	---



2. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan penghargaan dan apresiasi dalam ketepatan penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP 8%), Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran Program Jaminan Kematian (JKM) Tahun 2025



3. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan penghargaan dan apresiasi sebagai peraih Peringkat Kedua pada kategori Penilaian Penyaluran Dana Desa TA 2025 Terbaik



PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN

SOSIALISASI DAN REKONSILIASI DENGAN TASPEN



KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN KPPN PADANG



REKON BOS



RAPAT INTERNAL PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH



KOORDINASI TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN BPK RI



F) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.10

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.5.2.1.1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkannya akuntabilitas pengelolaan APBD	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Anggaran tepat waktu	100	Menunjang	Penyusunan Dokumen Perencanaan secara terperinci Penyesuaian penyusunan anggaran dengan regulasi terbaru	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	100	Menunjang	Pengelolaan struktur dan porsi APBD sesuai dengan ketentuan dan regulasi terbaru
1.5.2.1.1								Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100	Menunjang	Efisiensi dalam pengelolaan belanja dan Management Kas Ketat	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	100	Menunjang	Pengelolaan struktur dan porsi APBD sesuai dengan ketentuan dan

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															regulasi terbaru
1.5.2.1.1								Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100	Menunjang	Percepatan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Penyusunan LKPD oleh seluruh SKPD	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	100	Menunjang	Pengelolaan struktur dan porsi APBD sesuai dengan ketentuan dan regulasi terbaru
												Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	Menunjang	Transparansi informasi keuangan daerah yang bisa di akses publik
												Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar	100	Menunjang	Penyusunan APBD sesuai dengan aturan

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025 - 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															yang berlaku
												Persentase penurunan SILPA	100	Menunjang	Pengoptimalan upaya penurunan silpa
												Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	100	Menunjang	Pengelolaan manajemen kas yang disiplin
												Persentase Kepemilikan NPWP	100	Menunjang	Peningkatan dalam persentase kepemilikan NPWP
												Persentase Laporan Keuangan	100	Menunjang	Penyusunan laporan

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												Tepat Waktu			keuangan tepat waktu
												Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	100	Menunjang	Penyusunan belanja APBD sesuai dengan regulasi
												Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	100	Menunjang	Pengelolaan Porsi APBD yang akurat
												Opini Laporan Keuangan	100	Menunjang	Pencapaian opini WTP atas LKPD
												Informasi tentang sumber daya yang tersedia	100	Menunjang	Pengelolaan informasi sumber daya yang

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												untuk pelayanan			optimal untuk pelayanan
1.5.2.1. 1.1							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan APBD Tepat Waktu	100	Menunjang	Percepatan Penyusunan , RKPD, KUA PPAS dan Standar Harga Satuan	Persentase Pengalokasian Penganggaran yang Sesuai Dokumen Perencanaan	100	Menunjang	Percepatan Penyusunan , RKPD, KUA PPAS dan Standar Harga Satuan
												Jumlah Dokumen Rancangan Penganggaran	100	Menunjang	
												Jumlah Dokumen Verifikasi Penganggaran	100	Menunjang	
1.5.2.1. 1.1.1							Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100	Menunjang	penyusunan dokumen KUA PPAS tepat waktu sesuai	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100	Menunjang	penyusunan dokumen KUA PPAS tepat waktu sesuai

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											jadwal tahapan penganggaran				jadwal tahapan penganggaran
1.5.2.1. 1.1.2							Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100	Menu njang	terverifikasi ya RKA tepat waktu untuk lanjut kepada tahapan penetapan DPA	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100	Men unja ng	terverifikasi nya RKA tepat waktu untuk lanjut kepada tahapan penetapan DPA
1.5.2.1. 1.1.3							Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	100	Menu njang	penyusunan DPA awal yang terverifikasi tepat waktu	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	100	Men unja ng	penyusunan DPA awal yang terverifikasi tepat waktu
1.5.2.1. 1.1.4							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan	100	Menu njang	Percepatan Penyusunan Perda dan Pebup APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan	100	Men unja ng	Percepatan Penyusunan Perda dan Pebup APBD

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
1.5.2.1. 1.1.5							Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100	Menunjang	penyusunan Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran tepat waktu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100	Menunjang	penyusunan Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran tepat waktu
1.5.2.1. 1.2							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan perbendaharaan yang terlaksana	100	Menunjang	perencanaan dan penatausahaan keuangan yang baik dan terlaksana	Persentase pengelolaan kas daerah	100	Menunjang	Pengelolaan kas daerah yang akurat

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								sesuai dengan ketentuan yang berlaku			sesuai aturan yang berlaku				
												Jumlah Dokumen SP2D yang terbit sesuai SOP	100	Men unja ng	Penerbitan SP2D sesuai dengan aturan
												Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan	100	Men unja ng	Pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelola keuangan
1.5.2.1. 1.2.1							Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100	Menu njang	pengelolaan kas daerah yang terlaksana akurat dan tepat waktu dengan didukung kualitas dan kuantitas SDM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100	Men unja ng	pengelolaan kas daerah yang terlaksana akurat dan tepat waktu dengan didukung kualitas dan kuantitas

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											pengelolaan perbendaharaan				SDM pengelolaan perbendaharaan
1.5.2.1. 1.2.2							Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100	Menunjang	Percepatan Penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ke Pusat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100	Menunjang	Percepatan Penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ke Pusat

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.5.2.1. 1.2.3							Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	100	Menunjang	Peningkatan Kapasitas terhadap Pejabat Pengelola Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	100	Menunjang	Peningkatan Kapasitas terhadap Pejabat Pengelola Keuangan
1.5.2.1. 1.3							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	Menunjang	Percepatan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Penyusunan LKPD oleh seluruh SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	100	Menunjang	Penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu
												Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi yang Tersusun	100	Menunjang	Terlaksananya Penyusunan dokumen kebijakan akuntansi

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pembinaan	100	Menunjang	Pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada perangkat daerah
1.5.2.1. 1.3.1							Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100	Menunjang	Percepatan pengusulan jadwal pembahasan dengan eksekutif legislatif	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100	Menunjang	Percepatan pengusulan jadwal pembahasan dengan eksekutif legislatif
1.5.2.1. 1.3.2							Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	100	Menunjang	Rekonsiliasi berkala dengan PD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	100	Menunjang	Rekonsiliasi berkala dengan PD

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Rencana 2021- 2026 %	Capaian Rencana 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menung- gung/ Tidak Menung- gung	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menung- gung/ Tidak Menung- gung	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Keuangan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			
1.5.2.1. 1.3.3							Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung- jawaban Daerah tentang Pertanggung- jawaban Pelaksana- an APBD Kabupaten/ Kota dan Pelaksana- an APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung- jawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung- jawaban	100	Menu- nggung	Komitmen Kepala Daerah, Pihak Eksekutif dan Legislatif dalam Menyelesaik- an PERDA Pertanggung- jawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung- jawaban	100	Men- unja- ng	Komitmen Kepala Daerah, Pihak Eksekutif dan Legislatif dalam Menyelesaik- an PERDA Pertanggung- jawaban

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota				Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota			
1.5.2.1. 1.3.4							Koordinasi , Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100	Menunjang	Peningkatan tindak lanjut LHP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100	Menunjang	Peningkatan tindak lanjut LHP

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.5.2.1. 1.3.5							Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100	Menunjang	Update Regulasi terbaru dalam penyusunan kebijakan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100	Menunjang	Update Regulasi terbaru dalam penyusunan kebijakan
1.5.2.1. 1.3.6							Pembinaan Akuntansi , Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	100	Menunjang	pembinaan dan bimtek dalam penyusunan LKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	100	Menunjang	pembinaan dan bimtek dalam penyusunan LKPD

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.5.2.1. 1.4							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen penyaluran keuangan daerah	100	Menunjang	Peningkatan perencanaan dalam pengelolaan dan penyaluran keuangan	Persentase realisasi pengelolaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100	Menunjang	Pelaksanaan kegiatan penyaluran keuangan yang terlaksana dengan baik
1.5.2.1. 1.4.1							Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100	Menunjang	Peningkatan penatausahaan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100	Menunjang	Peningkatan penatausahaan penyaluran bantuan keuangan
1.5.2.1. 1.4.2							Pengelolaan Dana Darurat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	Menunjang	Peningkatan verifikasi penyaluran BTT	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	Menunjang	Peningkatan verifikasi penyaluran BTT

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							dan Mendesak	Dana Darurat dan Mendesak				n Dana Darurat dan Mendesak			
1.5.2.1. 1.4.3							Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	100	Menu njang	Peningkatan pengelolaan penyaluran DBH	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten /Kota	100	Men unja ng	Peningkatan pengelolaan penyaluran DBH
1.5.2.1. 1.5							Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen dan Data Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	Menu njang	Optimalisasi Pemanfaatan SIPD	Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup pengelolaan keuangan daerah	100	Men unja ng	Optimalisasi Pemanfaatan SIPD

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran Renstra 2025- 2029	Indikator Kinerja Renstra 2021- 2026	Indikator Kinerja Renstra 2025- 2029	Capaian Renstra 2021- 2026 %	Capaian Renstra 2025- 2029 %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja 2021-2026	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2021- 2026	Indikator Kinerja 2025-2029	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.5.2.1. 1.5.1							Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah	100	Menunjang	Optimalisasi Pemanfaatan SIPD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah	100	Menunjang	Optimalisasi Pemanfaatan SIPD

Sumber : Capaian Kinerja Tahun 2025

	Sasaran 2 (Renstra 2021-2026) <i>Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)</i>
	Sasaran 2 (Renstra 2025-2029) <i>Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah</i>

Sasaran 2 (dua) pada Renstra 2021-2026 merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang bersih dan akuntabel. Pengelolaan asset daerah ini menjadi salah satu sasaran yang diprioritaskan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai sasaran RPJMD tahun 2021-2026, yaitu Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel dengan indikator sasaran yaitu Opini WTP Atas Laporan

Keuangan Daerah.

Formulasi pengukuran : Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD

Sedangkan pada sasaran 2 (dua) pada Renstra 2025-2029 merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan asset daerah ini menjadi salah satu sasaran yang diprioritaskan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai sasaran RPJMD tahun 2025-2029, yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Opini BPK atas laporan keuangan.

Sebagai upaya meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Padang Pariaman, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Program dan kegiatan sasaran 2

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
		Penyusunan Standar Harga	100%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%
		Pengamanan Barang Milik Daerah	100%
		Penilaian Barang Milik Daerah	100%
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

Tabel 3.12
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian 2025		
	Target	Realisasi	%
IKU 2021-2026			
Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	100%
Indikator Kinerja	Capaian 2025		
	Target	Realisasi	%
IKU 2025-2029			
Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,00	2,00*	100% *

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab BPKD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah dan pembantu pengurus barang dalam melaksanakan kewenangannya, maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang milik daerah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan pengelolaan BMD.

Setiap Perangkat Daerah atau unit kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang daerah harus melakukan penatausahaan aset. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang disusun laporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Padang Pariaman melalui Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku pembantu pengelola barang daerah dan menjadi laporan Barang Milik Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Wewenang dan tanggungjawab Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah.

B) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.13
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dan tahun lalu;

N O	INDIKA TOR	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		Targ et	Realis asi	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si
IKU 2021-2026									
1	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap p Pengelolan BMD	0	0	0	0	0	0	0	0

N O	INDIKA TOR	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		Targ et	Realis asi	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si
IKU 2025-2029									
1	Indeks Pengelol aan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00*

Dari tabel diatas, untuk IKU Tahun 2021-2026 terlihat perbandingan capaian target kinerja Tahun 2022-2025 berhasil dengan tidak adanya temuan BPK yang material terhadap pengelolaan BMD. Namun untuk lebih efektifnya pengelolaan BMD masih terdapat beberapa kendala yang membutuhkan penanganan cepat sehingga pengelolaan BMD di Kabupaten Padang Pariaman terinventaris dengan baik dan memberikan manfaat dalam menunjang capaian program dan kegiatan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk IKU Tahun 2025-2029 terlihat tidak ada data pembanding dikarenakan indikator ini baru bisa di hitung pada Tahun 2025.

C) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Berikut capaian jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2021-2025 seperti table berikut :

Tabel 3.14
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran	Indikator or Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IKU 2021-2026																	
1.	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	Jumlah Temuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		83,3	Berhasil
No	Sasaran	Indikator or Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
IKU 2025-2029																	
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelola aset daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Angka	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,00*	0	0	0			100*	Berhasil

D) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2025 serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IKU 2021-2026							
1. 5. 2.	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	100	1. Peningkatan Kepatuhan PD dalam menyampaikan Laporan Aset 2. Percepatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD 3. Inventarisasi BMD berkala 4. Pelaksanaan pembinaan dalam pemberian kodefikasi BMD 5. Melaksanakan rekon aset secara intens dan berkala	1. Meningkatkan Kualitas Rekon Aset 2. Meningkatkan Pemahaman tentang Pentingnya RKBMD dan RKPBMMD 3. Melakukan Penilaian Mandiri dan Meningkatkan SDM Penilai Pemda 4. Meningkatkan Rakor dengan Perangkat Daerah
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IKU 2025-2029							
1. 5. 2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,00	2,00*	100*	1. Target pertumbuhan aset tercapai 2. Belanja modal terealisasi optimal 3. Memberikan dampak terhadap pelayanan publik 4. Aset tercatat dengan tertib dan akurat	1. Meningkatkan Kualitas Rekon Aset 2. Meningkatkan kepatuhan pencatatan dan inventarisasi 3. Penguatan perencanaan BMD agar target dapat tercapai

Sumber : Rencana Tindak Lanjut Pengendalian BPKD 2025

E) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.16

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Targ et	Realis asi	% Capai an	Anggaran	Realisas i	% Capai an	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 2021-2026								
1.5.2.2	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	0	0	100	1.063.707.140	816.307.299	76,74	247.399.841
No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Targ et	Realis asi	% Capai an	Anggaran	Realisas i	% Capai an	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 2025-2029								
1.5.2.2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah	2,00	2,00*	100*	1.063.707.140	816.307.299	76,74	247.399.841

Sumber : LRA BPKD Tahun 2025

Dalam sasaran Tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah tercapai realisasi Rp. 816.307.299 dengan target Rp 1.063.707.140 atau sebesar 76,74%

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100%-76,74% = 23,26%
Total efisiensi	:	0% + 10,59% = 23,26%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **23,26%** dengan capaian kinerja berdasarkan hasil opini BPK RI Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/100%) sesuai dengan yang tertuang LHP BPK RI Nomor 64/S-HP/XVIII.PDG/05/2025 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 pada tanggal 22 Mei 2025 dengan pengurangnya adalah persentase capaian realisasi anggaran adalah 76,74%.

Dalam sasaran Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah tercapai realisasi Rp. 816.307.299 dengan target Rp 1.063.707.140 atau sebesar 76,74%.

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%*
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100%-76,74% = 23,26%*
Total efisiensi	:	0% + 10,59% = 23,26%*

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **23,26%***, akan tetapi data capaian kinerja bersifat sementara karena belum finalnya data Tahun 2025 terkait pengelolaan aset.

PROGRAM PENGELOLAAN BMD

INVENTARISASI KIB A, B DAN C KE UPTD



RAPAT KOPERASI MERAH PUTIH



REKONSILIASI SEMESTER



F) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.17

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikator Kinerja 2021 - 2026	Capaian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikator Kinerja 2025 - 2029	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja 2021- 2026	Capaian %	Menu njang / Tidak Menu njang	Analisis	Indikator Kinerja 2025- 2029	Capaian %	Menu njang / Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.5.2. 2.1	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	100	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	100	Menu njang	Inventarisasi BMD berkala	Persentase penambahan nilai aset tetap	100	Menu njang	Peningkatan nilai aset tetap tiap tahunnya

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikator Kinerja 2021 - 2026	Capaian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikator Kinerja 2025 - 2029	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja 2021- 2026	Capaian %	Menu njang / Tidak Menu njang	Analisis	Indikator Kinerja 2025- 2029	Capaian %	Menu njang / Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.5.2. 2.1								Persentase BMD yang Termanfaatkan dengan Tepat	100	Menu njang	Peningkatan monitoring pemanfaatan BMD tepat sasaran	Assets Managem ent	10 0	Menu njang	Aset yang terkelola dengan baik
1.5.2. 2.1								Persentase BMD yang Tertib	100	Menu njang	Peningkatan Kepatuhan PD dalam menyampaikan				

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikator Kinerja 2021 - 2026	Capaian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikator Kinerja 2025 - 2029	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja 2021- 2026	Capaian %	Menu njang / Tidak Menu njang	Analisis	Indikator Kinerja 2025- 2029	Capaian %	Menu njang / Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											Laporan Aset				
1.5.2. 2.1.1							Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tertib dan tepat waktu	100	Menu njang	Peningkatan Kepatuhan PD dalam menyampaikan Laporan Aset	Persentase BMD yang terinventarisasi dan dilaporkan	100	Menu njang	BMD yang terinventarisasi dengan baik
												Persentase kebijakan dan standarisasi	100	Menu njang	Penyusunan kebijakan dan standa

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikator Kinerja 2021 - 2026	Capaian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikator Kinerja 2025 - 2029	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja 2021- 2026	Capaian %	Menu jang / Tidak Menu jang	Analisis	Indikator Kinerja 2025- 2029	Capaian %	Menu jang / Tidak Menu jang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												pengadaan BMD yang tersusun			risasi BMD sesuai dengan aturan yang berlaku
												Persentase BMD yang dioptimalkan penggunaannya, pemanfaatan, pemimda	100	Menujang	Pelaksanaan pentat usaha an BMD yang terkelola

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikator Kinerja 2021 - 2026	Capaian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikator Kinerja 2025 - 2029	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja 2021- 2026	Capaian %	Menu njang / Tidak Menu njang	Analisis	Indikator Kinerja 2025- 2029	Capaian %	Menu njang / Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												htangana n, pemusna han dan penghapu san nya			denga n baik
												Persentas e BMD yang dioptimal kan pengama nannya	100	Menu njang	Terlak sanana ya Penga manan BMD
												Persentas e pengguna BMD yang ditingkat	100	Menu njang	Pelaks anaan kegiat an pemi naan

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikator Kinerja 2021 - 2026	Capaian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikator Kinerja 2025 - 2029	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja 2021- 2026	Capaian %	Menu jang / Tidak Menu jang	Analisis	Indikator Kinerja 2025- 2029	Capaian %	Menu jang / Tidak Menu jang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												kan kapasitas nya			pening katan kapasi tas pengel ola BMD
1.5.2. 2.1.1. 1							Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100	Menu jang	Percepatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100	Menu jang	Percepatan Penyusunan Standar Harga
1.5.2. 2.1.1. 2							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	100	Menu jang	Percepatan Penyusunan RKBM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	100	Menu jang	Percepatan Penyusunan RKBM

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikator Kinerja 2021 - 2026	Capaian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikator Kinerja 2025 - 2029	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja 2021- 2026	Capaian %	Menu jang / Tidak Menu jang	Analisis	Indikator Kinerja 2025- 2029	Capaian %	Menu jang / Tidak Menu jang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							n Barang Milik Daerah	Milik Daerah			D dan RKPB MD	Milik Daerah			D dan RKPB MD
1.5.2. 2.1.1. 3							Pengaman an Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengaman an Barang Milik Daerah	100	Menu jang	Invent arisasi BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamana n Barang Milik Daerah	100	Menu jang	Invent arisasi BMD
1.5.2. 2.1.1. 4							Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	100	Menu jang	Penilai an Mandir i dan Menng katkan SDM Penilai Pemda	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	100	Menu jang	Penilai an Mandi ri dan Menng katkan SDM Penilai Pemda

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikator Kinerja 2021 - 2026	Capaian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikator Kinerja 2025 - 2029	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja 2021- 2026	Capaian %	Menu njang / Tidak Menu njang	Analisis	Indikator Kinerja 2025- 2029	Capaian %	Menu njang / Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Penilaian Barang Milik Daerah				Penilaian Barang Milik Daerah			
1.5.2. 2.1.1. 5							Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	100	Menu njang	Peningkatan Rakor dengan PD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang	100	Menu njang	Peningkatan Rakor dengan PD

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikator Kinerja 2021 - 2026	Capaian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikator Kinerja 2025 - 2029	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja 2021- 2026	Capaian %	Menu jang / Tidak Menu jang	Analisis	Indikator Kinerja 2025- 2029	Capaian %	Menu jang / Tidak Menu jang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Barang Milik Daerah				Milik Daerah			
1.5.2. 2.1.1. 6							Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	100	Menu jang	Pelaksanaan pembinaan dan bimtek dalam penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	100	Menu jang	Pelaksanaan pembinaan dan bimtek dalam penyusunan Laporan BMD
1.5.2. 2.1.1. 7							Pembinaan Pengelolaan Barang Milik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	100	Menu jang	Pelaksanaan pembinaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan	100	Menu jang	Pelaksanaan pembinaan dan

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikator Kinerja 2021 - 2026	Capaian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikator Kinerja 2025 - 2029	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja 2021- 2026	Capaian %	Menujangan / Tidak Menujangan	Analisis	Indikator Kinerja 2025- 2029	Capaian %	Menujangan / Tidak Menujangan	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	n Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota			bimtek dalam penyusunan Laporan BMD	Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota			bimtek dalam penyusunan Laporan BMD

Sumber : Capaian Kinerja Tahun 2025

	Sasaran 3 (Renstra 2021-2026) Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	Sasaran 3 (Renstra 2025-2029) Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

Sasaran 3 (tiga) pada Renstra 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan upaya dalam peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator sasarannya adalah nilai Sakip Perangkat Daerah. Berikut formulasi pengukurannya:

Formulasi pengukuran : Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat

Sedangkan sasaran 3 (tiga) pada Renstra 2025-2029 Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan upaya dalam meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sasarannya adalah nilai Akip Perangkat Daerah. Dalam hal ini didukung melalui program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota yang berfungsi menunjang semua sasaran yang ada pada BPKD dalam mencapai visi Padang Pariman. Berikut formulasi pengukurannya :

Formulasi pengukuran : Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat

Sehubungan dengan besarnya kontribusi program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota ini terhadap jalannya sasaran, program dan kegiatan di BPKD maka untuk mencapai sasaran 3 (tiga) ini perlu didukung melalui kegiatan berikut :

Tabel 3.18
Program dan Kegiatan Sasaran 3

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%
		Administrasi keuangan perangkat daerah	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%
		Administrasi umum perangkat daerah	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

Tabel 3.19
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran 3

Indikator Kinerja	Capaian 2025		
	Target	Realisasi	%
IKU 2021-2026			
Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A (80,70)	A (80,15)	99,31
Indikator Kinerja	Capaian 2025		
	Target	Realisasi	%
IKU 2025-2029			
Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A (80,70)	A (80,15)	99,31

Berdasarkan tabel 3.19 diatas, untuk mencapai target yang sudah ditetapkan BPKD didukung berbagai faktor seperti :

1. Ketersediaan dana dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan serta pemenuhan dokumen tepat waktu
2. Komitmen dalam pertanggungjawaban PPTK terhadap SPJ kegiatan
3. Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran
4. Adanya dukungan kualitas sumber daya aparatur
5. Adanya sinergitas dengan seluruh pihak/stackholder terkait
6. Terjalinnya koordinasi internal dengan baik

Disamping itu juga terdapat beberapa kendala dalam pencapaian sasaran ini diantaranya :

1. Rasionalisasi anggaran yang mempengaruhi nilai PAGU pada masing-masing kegiatan
2. Keterlambatan dalam pembayaran tunjangan dan honor lainnya yang disebabkan oleh ketersediaan dana dan hal lainnya
3. Kurangnya fasilitas dalam melakukan bimtek sekaitan dengan program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota
4. Masih minimnya sarana dan prasarana dalam pencapaian sasaran

Dengan beberapa kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran tersebut namun tidak mengurangi komitmen untuk mencapai target nilai SAKIP BPKD pada tahun 2025

B) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan realisasi capaian IKU pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.20
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dan tahun lalu;

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKU 2021-2026									
1	Nilai Sakip Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	A
NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKU 2025-2029									
1	Nilai Akip Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A	A

Dapat diketahui bahwa sasaran 3 (tiga) yaitu peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan pada BPKD ini sangat berkontribusi besar dalam mencapai sasaran lain yang ada di BPKD diantaranya yaitu dalam meningkatkan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah,

Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Berikut capaian tahun 2025 atas sasaran 3 (tiga) dibandingkan dengan capaian jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 seperti yang terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.21

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoriat	Nilai	A	A	A	A	A	A	AA	A	A	A	A	-	83,3	Berhasil
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	A	A	A	AA	A	A	A	A	-	83,3	Berhasil

D) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran 2021-2026	Indikator Kinerja 2021-2026	Tujuan/Sasaran 2025-2029	Indikator Kinerja 2025-2029	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. 5. 2. 3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.70	80.15	99,31	1. Memaksimalkan pencairan sesuai tingkatan prioritas 2. Sinkronisasi dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaporan 3. Peningkatan penyusunan anggaran dengan kebutuhan 4. Memfasilitasi ASN dalam pengurusan dokumen kepegawaian	1. Efisiensi dalam pengelolaan belanja 2. Perlunya Adanya Sistem yang Terintegrasi antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan 3. Pemenuhan Anggaran untuk Mencukupi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor

Sumber : Rencana Tindak Lanjut Pengendalian BPKD 2025

E) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.23

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran 2021-2026	Tujuan/ Sasaran 2025-2029	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Tar get	Realisi sasi	% Capaian	Anggara n	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.2.3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	80.70 (A)	80.15 (A)	99,31	14.290.369.282	12.613.393.546	88,26	1.676.975.736

Sumber : LRA BPKD Tahun 2025

Dalam sasaran pada Renstra 2021-2026 yaitu meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Sasaran pada Renstra 2025-2029 yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai realisasi Rp. 12.613.393.546 dengan target Rp 14.290.369.282 atau sebesar 88,26%

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	99,31% - 100% = -0,69%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100%-88,26% = 11,74%
Total efisiensi	:	-0,69% + 11,74% = 11,05%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **11,05%** dengan capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi sakip yang dilakukan inpektorat, Badan Pengelola Keuangan Daerah mendapat nilai (A) atau dengan nilai 80,15.

1. Mencapai predikat A (80,15) memuaskan dalam implementasi Sakip Perangkat Daerah Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

INSPEKTORAT

Parik Malintang Kecamatan Anan Lingsiang Kode Pos 25584

Pos El. inspektora@padangpariamankab.go.id

Nomor Lampiran Hal

70/LHE/INSP/2025

-

-

-

Parik Malintang, 21 Juli 2025

Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Kepada:

Yth. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman

di:

Tempat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penilaian Kinerja Organisasi, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dan Penetapan Pedoman Evaluasi Internal Kabupaten Padang Pariaman No. 43 tahun 2023.

A. Evaluasi Implementasi SAKIP

Evaluasi implementasi SAKIP dapat memberikan simpulan hasil penilaian tahun sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dengan kriteria penilaian yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/ unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Nilai hasil penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, dengan kategori sebagai berikut :

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	KETERANGAN
1.	AA	>80 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>60 – 80	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik
5.	CC	>50 – 60	Cukup
6.	C	>30 – 50	Kurang

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	KETERANGAN
7.	D	0-30	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil evaluasi kami, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 80,15 dengan kategori A dan interpretasi nilai MEMUASKAN, dengan rincian sebagai berikut :

No.	KOMPONEN	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	25,50	30	24,00
2.	PENGUKURAN KINERJA	30	23,10	30	23,40
3.	PELAPORAN KINERJA	15	12,30	15	13,50
4.	EVALUASI INTERNAL	25	19,50	25	19,25
JUMLAH		100	80,40	100	80,15
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			80,40		80,15
PREDIKAT			A (MEMUASKAN)		A (MEMUASKAN)

Evaluasi Implementasi SAKIP dapat memberikan simpulan hasil penilaian tahun sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dengan kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/ unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

2. Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024 dan 2025

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPKD Tahun 2024						
NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1	Menyempurnakan perencanaan kinerja sehingga dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan yaitu : a. Aktivitas yang dilaksanakan harus mendukung kinerja yang ingin dicapai yaitu Rencana Aksi tahun 2023 dan tahun 2024 b. Setiap pegawai harus memahami, peduli dan berkomitmen terhadap kinerja yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian kinerja	1. Untuk rencana aksi 2024 sudah disusun sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mempedomani sub kegiatan pada masing-masing bidang 2. Akan menyusun komitmen bersama dengan semua ASN dalam pencapaian kinerja	2 Dokumen	Jan s/d Des 2024 Januari 2025	Kepala BPKD	Dalam proses
2	Melengkapi pemenuhan dokumen pengukuran yaitu : a. Menyusun SOP Pengukuran Kinerja BPKD b. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang mencakup mekanisme dan pengumpulan data kinerja yang handal	1. Sudah dilakukan penyusunan SOP Pengukuran Kinerja sesuai LHE Inspektora 2. Sudah dilakukan penyusunan SOP Pengumpulan Data Kinerja	2 Dokumen	Juli 2024	Sekretariat BPKD (Perencanaan)	Dalam proses
3	Memantapkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	1. Dalam pencapaian kinerja sudah mempedomani pengukuran kinerja yang ada 2. Untuk pemberian reward dan punishment akan dipelajari dan disusun terlebih dahulu indikator pengukurannya Akan mengoptimalkan penggunaan laporan kinerja BPKD dalam melaksanakan kegiatan dan kebijakan dalam pencapaian kinerja yang lebih baik	1 Kegiatan	Jan s/d Des 2024 Januari 2025	Kepala BPKD	Dalam Proses
5	Menggunakan informasi Laporan Kinerja BPKD dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Akan lebih mengoptimalkan evaluasi internal secara berjenjang pada masing-masing bidang	1 Dokumen	Juli-Desember 2024	Seluruh Bidang pada BPKD	Dalam proses
6	Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara rutin dan berjenjang	Akan lebih mengoptimalkan evaluasi internal secara berjenjang pada masing-masing bidang	1 Dokumen	Juli s.d Desember 2024	Kepala BPKD	Dalam Proses
7	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkualitas dengan pendalaman dan Sumber Daya yang memadai	Akan mengoptimalkan evaluasi kinerja dalam peningkatan kapasitas SDM guna pencapaian kinerja yang lebih baik	1 Kegiatan	Juli s.d Desember 2024	Kepala BPKD	Dalam proses

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP BPKD TAHUN 2025						
NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1	Memutakhirkan pedoman teknis (SOP) Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Kinerja serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang berpedoman pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang	Telah dilakukan pemutakhiran SOP perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pengumpulan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan mempedomani perbup no 12 Tahun 2023 tentang Sakip	3 Dokumen	Agust s/d Des 2025	BPKD	100%
2	Agar setiap pegawai menyusun Sasaran Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan	sudah menyusun sasaran kinerja Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan	1 Perangkat	Okt s/d Des 2025	BPKD	100%
3	Agar kepala OPD memastikan kembali bahwa seluruh pegawai, dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, memahami sasaran kinerja organisasi dan bagaimana kontribusi masing-masing individu mendukung pencapaian tersebut	sudah menyusun serta mensosialisasikan perjanjian kinerja kepada masing-masing pegawai	1 Perangkat Daerah	Des 2025 s/d Jan 2026	BPKD	100%
4	Agar kepala BPKD berperan aktif dalam siklus perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis kinerja	melakukan peningkatan evaluasi kinerja	1 Perangkat	Agust s/d Des 2025	Kepala BPKD	100%
5	Agar kepala BPKD langsung melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara rutin dan berjenjang dalam rangka percepatan pengambilan keputusan dan kebijakan terhadap permasalahan rencana aksi yang telah dilakukan	melakukan peningkatan evaluasi kinerja	1 Perangkat Daerah	Agust s/d Des 2025	Kepala BPKD	100%
6	Agar kepala BPKD lebih meningkatkan bekerja sama dengan BKPSDM dalam menerapkan sistem merit, dengan mempertimbangkan integrasi hasil pengukuran kinerja, rekam jejak, kompetensi, dan potensi dalam pengambilan	Peningkatan pengimplementasian aplikasi SIKAP	1 Perangkat Daerah	Setiap hari kerja	BPKD	100%
7	Agar kepala BPKD menerapkan evaluasi berkala terhadap kinerja tiap bidang/seksi/subbagian, unit yang secara konsisten menunjukkan kinerja rendah atau tidak relevan dengan target strategis perlu ditinjau ulang keberadaannya, agar kepala OPD dapat mendorong bahwa setiap kajian kelembagaan, baik internal maupun yang dilakukan bersama BKPSDM/Bagian organisasi,	Penyusunan inovasi dalam penilaian kinerja internal	1 Perangkat Daerah	Apr 2026	BPKD	dalam proses
8	Agar kepala BPKD terus memperkuat budaya kinerja melalui komunikasi rutin, pembinaan, dan keteladanan agar semangat kepedulian terhadap hasil kinerja tetap konsisten di seluruh level organisasi	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Perangkat Daerah	Nov 2025	BPKD	100%
9	Agar kepala BPKD melakukan evaluasi rutin tentang seberapa jauh pemahaman dan perhatian pegawai terhadap laporan kinerja, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan berkelanjutan	melakukan rapat evaluasi rutin setiap tahunnya	1 Laporan	Jan 2026	Kepala BPKD	100%
10	Agar kepala BPKD menginstruksikan kepada kepala bidang untuk memanfaatkan hasil laporan kinerja triwulan/bulanan dibahas secara rutin dalam rapat evaluasi sebagai dasar koreksi dan penyesuaian kegiatan berikutnya	melakukan inovasi Sikijang	1 Perangkat Daerah	Apr 2026	BPKD	dalam proses
11	Agar kepala BPKD mendorong perubahan paradigma bahwa kinerja bukan hanya sekedar laporan atau kewajiban administratif, tapi menjadi bagian dari identitas dan nilai kerja setiap pegawai	Peningkatan kapasitas SDM BPKD	1 Perangkat Daerah	Des 2025	BPKD	100%
12	Agar kepala BPKD dan seluruh staf melakukan pendalaman evaluasi akuntabilitas kinerja lebih spesifik sesuai dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, serta mendorong tim evaluasi untuk menggunakan metode seperti 5 Whys atau Fishbone Diagram dalam mengevaluasi deviasi kinerja, sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat strategis dan menyentuh sumber masalah utama	Peningkatan kapasitas SDM BPKD	1 Perangkat Daerah	Des 2025	BPKD	100%
13	Agar kepala BPKD memastikan dan mendorong bahwa seluruh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tidak hanya disimpan sebagai dokumen, tetapi dijadikan bahan utama dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan program	Peningkatan kapasitas SDM BPKD	1 Perangkat Daerah	Des 2025	BPKD	100%

TRANSFORMASI PELAYANAN BPKD



RAPAT PENINGKATAN KINERJA SERTA PELAYANAN BPKD



RAPAT SINGKRONISASI POHON KINERJA BPKD 2025-2029



F) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.24

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran 2025-2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capai an %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an %	Menunja ng/ Tidak Menunja ng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.5.2.3.1	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Akip Peringkat Daerah	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100	Menunjang	Sinkronisasi dokumen perencanaan
1.5.2.3.1							Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100	Menunjang	Verifikasi Dokumen Keuangan PD Percepatan tindak Lanjut LHP BPK
1.5.2.3.1							Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100	Menunjang	Meningkatkan Agreement

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran 2025-2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capai an %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an %	Menunja ng/ Tidak Menunja ng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										terkait Optimalisasi Kinerja secara Akuntabel
1.5.2.3.1. 1						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	100	Menunja ng	Sinkronisasi dokumen perencanaan
1.5.2.3.1. 1							Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	100	Menunja ng	Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA
1.5.2.3.1. 1.1						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunja ng	Sinkronisasi dokumen perencanaan
1.5.2.3.1. 1.2						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	100	Menunja ng	Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran 2025-2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capai an %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an %	Menunja ng/ Tidak Menunja ng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.5.2.3.1. 2						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	100	Menunja ng	Percepatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1.5.2.3.1. 2.1						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunja ng	Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku
1.5.2.3.1. 2.2						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	Menunja ng	Pelaksanaan pembayaran jonor pengelola keuangan tepat waktu

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran 2025-2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capai an %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an %	Menunja ng/ Tidak Menunja ng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										dan sesuai aturan yang berlaku
1.5.2.3.1. 5						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	100	Menunja ng	Menfasilitasi ASN dalam pengurusan dokumen kepegawaian
1.5.2.3.1. 5							Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	100	Menunja ng	Menfasilitasi ASN dalam pengurusan dokumen kepegawaian
1.5.2.3.1. 5							Jumlah SKP ASN	100	Menunja ng	Menfasilitasi ASN dalam pengurusan dokumen kepegawaian
1.5.2.3.1. 5							Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	100	Menunja ng	Menfasilitasi ASN dalam pengurusan dokumen kepegawaian

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran 2025-2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capai an %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an %	Menunja ng/ Tidak Menunja ng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.5.2.3.1. 5.1						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	Menunja ng	Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas ASN
1.5.2.3.1. 5.2						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Menunja ng	Peningkatan fasilitasi bimtek ASN
1.5.2.3.1. 6						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	100	Menunja ng	Peningkatan pelayanan administrasi umum
1.5.2.3.1. 6							Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	100	Menunja ng	Peningkatan pelayanan administrasi umum
1.5.2.3.1. 6.1						Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	100	Menunja ng	Peningkatan pelaksanaan

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran 2025-2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capai an %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an %	Menunja ng/ Tidak Menunja ng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kanto
1.5.2.3.1. 6.2						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	Menunja ng	Peningkatan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.5.2.3.1. 6.3						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Menunja ng	Menfasilitasi Kunjungan Tamu
1.5.2.3.1. 6.4						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunja ng	Peningkatan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran 2025-2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capai an %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an %	Menunja ng/ Tidak Menunja ng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.5.2.3.1. 7						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	100	Menunja ng	Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.2.3.1. 7.1						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Menunja ng	Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.5.2.3.1. 8						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	100	Menunja ng	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran 2025-2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capai an %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an %	Menunja ng/ Tidak Menunja ng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Pemerintahan Daerah
1.5.2.3.1.8							Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	100	Menunja ng	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.2.3.1.8.1						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunja ng	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.5.2.3.1.8.2						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunja ng	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.2.3.1.8.3						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	100	Menunja ng	Pelaksanaan Penyediaan Jasa

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran 2025-2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capai an %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an %	Menunja ng/ Tidak Menunja ng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Kantor yang Disediakan			Pelayanan Umum Kantor
1.5.2.3.1. 9						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	100	Menunja ng	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.2.3.1. 9							Jumlah total nilai aset	100	Menunja ng	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.2.3.1. 9.1						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	100	Menunja ng	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Tujuan/ Sasaran 2025-2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capai an %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capai an %	Menunja ng/ Tidak Menunja ng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya			Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.2.3.1. 9.2						Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	100	Menunja ng	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.2.3.1. 9.3						Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	100	Menunja ng	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	Sasaran 4 (Renstra 2021-2026) Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Sasaran 4 (Renstra 2025-2029) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sasaran 4 (empat) Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Renstra 2021-2026 merupakan upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Kontribusi sektor pajak dan retribusi sangat diharapkan dalam menambah pendapatan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Formulasi pengukuran : $\text{realisasi} / \text{target} \times 100\%$

Daerah pada Renstra 2025-2029 yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dengan indikator sasaran Persentase penerimaan PAD terhadap target dan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB.

Upaya yang dilakukan Badan Pengelola keuangan Daerah untuk mencapai sasaran 4 (empat) ini perlu didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.25
Program dan kegiatan sasaran 4

No	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100%
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100%
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	100%

		serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	100%
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100%
		Penagihan Pajak Daerah	100%
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100%
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100%

A) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.26
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran

Indikator Kinerja	Capaian 2025		
	Target	Realisasi	%
IKU 2021-2026			
Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	7%	25,22*	360,28*
Indikator Kinerja	Capaian 2025		
	Target	Realisasi	%
IKU 2025-2029			
Persentase penerimaan PAD terhadap target	91,182	98,521*	108,04*
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,51	0,31*	60,78*

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas tentang pengukuran capaian sasaran 4 terdapat peningkatan yang sangat tinggi dari penerimaan pajak dan retribusi daerah di tahun 2025, dan juga tercapainya realisasi terhadap target untuk indikator persentase penerimaan PAD terhadap target dan rasio pajak daerah terhadap PDRB.

Untuk Sasaran Strategis IKU 2021-2026 “Meningkatkan Pengelolaan PAD” dengan Indikator Kinerjanya “*Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah*” dapat dilihat capaian yang tinggi dari target yang ditetapkan, dimana realisasi pada tahun 2025 mencapai 25,22% sedangkan target hanya 7%. Peningkatan yang sangat

signifikan ini diakibatkan adanya penyesuaian rekening belanja penerimaan retribusi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dimana Pendapatan BLUD yang sebelumnya termasuk pada Pendapatan Lain-Lain, namun sesuai dengan Undang-Undang diatas harus disesuaikan, dimana pendapatan BLUD tersebut termasuk kedalam penerimaan retribusi dengan rincian belanja nya yaitu *“Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit”*. Sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan pada penerimaan PAD pada tahun 2025.

Sedangkan Untuk Sasaran Strategis IKU 2025-2029 *“persentase penerimaan PAD terhadap target”* dapat dilihat dari tercapainya target yang telah ditetapkan dan *“rasio pajak terhadap PDRB”* mendapat capaian rendah karena data masih bersifat sementara.

B) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi merupakan salah satu pendapatan yang berkontribusi besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan tabel dibawah, terjadi kenaikan pajak dan retribusi daerah yang cukup tinggi, sehingga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah pada APBD Padang Pariaman.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi personil pemungut pajak dan retribusi diatas, namun tidak mengurangi realisasi persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 3.27

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dan tahun lalu;

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		Target	Realisas i	Target	Realisas i	Targe t	Realisas i	Target	Realisas i
IKU 2021-2026									
1	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	5,5	13,05	6	21,56	6,5	99,28	7	25,22*
NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		Target	Realisas i	Target	Realisas i	Targe t	Realisas i	Target	Realisas i
IKU 2025-2029									
1	Persentase penerimaan PAD terhadap target	-	100,202	-	96,862	-	91,181	91,182	98,521*
2	Rasio Pajak terhadap PDRB	-	0,23	-	0,25	-	0,23	0,51	0,31*

Sedangkan untuk capaian indikator 2025-2029, dapat dilihat tercapainya indikator persentase penerimaan PAD terhadap target, akan tetapi untuk rasio pajak daerah terhadap PDRB masih rendah dikarenakan data masih bersifat sementara dalam proses penyusunan LKPD Tahun 2025.

c). Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Berikut capaian tahun 2025 bila dibandingkan dengan capaian jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2021-2026 dan 2025-2029 dimana terlihat capaian yang cukup tinggi dibanding dengan target yang telah ditetapkan :

Tabel 3.28
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran	Indikator or Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
IKU 2021-2026																	
1.	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase	5	5,5	6	6,5	7	7,5	5,71	13,05	21,56	99,28	25,22*	-	439,52*	Sangat Berhasil
No	Sasaran	Indikator or Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
IKU 2025-2029																	
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase penerimaan PAD terhadap target	Persentase	91,182	91,186	91,189	91,188	91,187	91,187	98,521*						21,60*	berhasil
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Angka	0.51	0.53	0,55	0,57	0,59	0,6	0,31*						60,78*	berhasil

E) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.29
Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
IKU 2021-2026							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5.2.4	Meningkatkan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	7	25,22	360,28	1. Pemutakhiran data pajak 2. Penggalian potensi pajak baru 3. Peningkatan Pemungutan PAD 4. Peningkatan penggunaan aplikasi berbasis online untuk seluruh pajak 5. Peningkatan kualitas pendataan dan penggalian potensi pajak daerah 6. Penggunaan Aplikasi e-PBB dan e-BPHTB	1. Melakukan penillain massal untuk 17 kecamatan 2. Pendataan yang Akurat dan menggali potensi PAD baru 3. Edukasi dan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan 4. Peningkatan Database Pajak Secara Online 5. Pendataan piutang pajak jatuh tempo
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
IKU 2025-2029							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5.2.4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase penerimaan PAD terhadap target	91,182	98,521*	108,04%*	1. Tercapainya realisasi PAD 2. Peningkatan Pemungutan PAD	1. Peningkatan kepatuhan wajib pajak 2. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi 3.

		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,51	0,31*	60,78*	1. Tingkat rasio pajak terhadap PDRB 2. Efektivitas pemanfaatan potensi ekonomi 3. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	1. Peningkatan kepatuhan wajib pajak 2. Pengoptimalan sistem pemungutan pajak
--	--	----------------------------------	------	-------	--------	---	--

Sumber : Rencana Tindak Lanjut Pengendalian BPKD 2025

F) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.30

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Targ et	Realisa si	% Capai an	Anggaran	Realisas i	% Capai an	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 2021-2026								
1.5.2. 4	Meningkat kan Pengelolaa n PAD	7	25,22*	360,28*	1.228.805. 800	585.209.4 46	47,62	643.596.3 54
No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Targ et	Realisa si	% Capai an	Anggaran	Realisas i	% Capai an	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 2025-2029								
1.5.2. 4	Meningkat nya Pendapata n Asli Daerah (PAD)	91,18 2	98,521*	108,04 %*	1.228.805. 800	585.209.4 46	47,62	643.596.3 54
		0,51	0,31*	60,78*				

Sumber : LRA BPKD Tahun 2025

Dalam sasaran meningkatkan pengelolaan PAD tercapai realisasi Rp. 585.209.446 dengan target Rp 1.228.805.800 atau sebesar 47,62%

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100%-47,62% = 52,38%*
Total efisiensi	:	0% + 52,38% = 52,38%*

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 52,38%*.

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

RAPAT KINERJA SERTA EVALUASI PENDAPATAN DAERAH



RAPAT SINERGI OPSEN PKB DAN BBNKB



PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

DI WILAYAH PADANG PARIAMAN



F) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.31

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Program / Kegiatan	Indikato r Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Indikato r Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Menunj ang/ Tidak Menunj ang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.5.2.4.1	Meningka tkan Pengelola an PAD	Persent ase Peningk atan Penerim aan Pajak dan Retribu si Daerah	100	Meningk atnya Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Persent ase peneri maan PAD terhada p target	100	PROGRAM PENGELO LAAN PENDAPA TAN DAERAH	Persentase Ketersedia an Data Objek dan Subjek PAD	100	Persentase PAD terhadap Pendapata n Daerah	100	Menunj ang	Pendataa n dan Pemutakh iran data pajak daerah, dan Peningkat an Pemungut an PAD
1.5.2.4.1					Rasio Pajak Daerah terhada p PDRB	100		Persentase Pencapaia n Target PAD	100	Revenue mobilizatio n: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran	100	Menunj ang	Peningkat an Pemungut an PAD serta pencapaia

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Program / Kegiatan	Indikato r Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Indikato r Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Menunj ang/ Tidak Menunj ang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										PAD dalam APBD			n target PAD
										Cakupan pembinaa n dan Pengawasa n Pengelolaa n Pendapata n	100	Menunj ang	Pelaksana an pembinaa n, pengawas an, dan pengelola an pendapat an yang optimal
										Persentase penerapan sistem infromasi keuangan berbasis digital	100	Menunj ang	Penerapa n digitalisas i dalam pengelola an keuangan
1.5.2.4.1 .1							Kegiatan Pengelolaa	Jumlah dokumen	100	Persentase wajib	100	Menunj ang	Pendataa n dan

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Program / Kegiatan	Indikato r Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Indikato r Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Menunj ang/ Tidak Menunj ang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							n Pendapata n Daerah	ketersedia an data objek dan subjek pajak		pajak yang taat membayar pajak daerah			Pemutakh iran data pajak daerah, meningka tkan kepatuha n wajib pajak
1.5.2.4.1 .1								Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Daerah	100	Persentase Realisasi Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	100	Menunj ang	Peningkat an Pemungut an PAD, pencapaia n target realisasi pajak non PBB dan BPHTB
										Persentase Realisasi PBB dan BPHTB	100	Menunj ang	pencapaia n target realisasi pajak

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Program / Kegiatan	Indikato r Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Indikato r Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Menunj ang/ Tidak Menunj ang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													PBB dan BPHTB
										Persentase wajib pajak baru yang terdaftar	100	Menunj ang	Pengopti malan pendataa n wajib pajak
										Indeks Kepuasan Masyaraka t terhadap Pelayanan Pajak Daerah	100	Menunj ang	Layanan pajak daerah yang menguta makan pelayanan maksimal kepada masyarak at
										Jumlah Dokumen Pelaporan Pajak Daerah	100	Menunj ang	Penyusun an laporan pajak

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Program / Kegiatan	Indikato r Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Indikato r Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Menunj ang/ Tidak Menunj ang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													tepat waktu
1.5.2.4.1 .1.1							Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100	Menunj ang	Penyusunan Perda Perbup Pajak Daerah
1.5.2.4.1 .1.2							Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan	100	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan	100	Menunj ang	Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Program / Kegiatan	Indikato r Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Indikato r Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Menunj ang/ Tidak Menunj ang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Pajak Daerah	Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Kebijakan Pajak Daerah
1.5.2.4.1 .1.3							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	Menunjang	Penggunaan dan pemeliharaan aplikasi pajak daerah
1.5.2.4.1 .1.4							Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan	100	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan	100	Menunjang	Pendataan dan pemutakhiran pajak daerah

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Program / Kegiatan	Indikato r Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Indikato r Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Menunj ang/ Tidak Menunj ang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Wajib Pajak Daerah		Wajib Pajak Daerah			
1.5.2.4.1 .1.5							Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaik an NJOP nya	100	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaik an NJOP nya	100	Menunj ang	Penilaian PBB dan BPHTB
1.5.2.4.1 .1.6							Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100	Menunj ang	Penetapa n pajak daerah sesuai aturan dan tarif

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Program / Kegiatan	Indikato r Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Indikato r Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Menunj ang/ Tidak Menunj ang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													yang berlaku
1.5.2.4.1 .1.7							Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100	Menunj ang	Penyusun an Laporan realisasi penerima an pajak daerah
1.5.2.4.1 .1.8							Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksana an Penagihan Pajak Daerah	100	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksana an Penagihan Pajak Daerah	100	Menunj ang	Optimalis asi penagiha n pajak daerah
1.5.2.4.1 .1.9							Pengendali an, Pemeriksa	Jumlah Dokumen Hasil	100	Jumlah Dokumen Hasil	100	Menunj ang	Pelaksana an Pengendal

No.	Tujuan/ Sasaran 2021- 2026	Indikat or Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Tujuan/ Sasaran 2025- 2029	Indikat or Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Program / Kegiatan	Indikato r Kinerja 2021- 2026	Capa ian %	Indikato r Kinerja 2025- 2029	Capa ian %	Menunj ang/ Tidak Menunj ang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							an dan Pengawasa n Pajak Daerah	Pemeriksa an serta Pengendali an dan Pengawasa n Pajak Daerah		Pemeriksa an serta Pengendali an dan Pengawasa n Pajak Daerah			ian, Pemeriksa an dan Pengawas an Pajak Daerah
1.5.2.4.1 .1.10							Elektronifi kasi Transaksi Pemerinta h Daerah	Jumlah Laporan Perkemba ngan Elektronifi kasi Transaksi Pemerinta h Daerah	100	Jumlah Laporan Perkemba ngan Elektronifi kasi Transaksi Pemerinta h Daerah	100	Menunj ang	Penyusun an laporan perkemba ngan elektronifi kasi transaksi pemerinta h daerah

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.32 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
		Rp	Rp	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	14.290.369.282	12.613.393.546	88,26
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.327.208	43.653.698	36,58
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.737.400	23.655.098	29,30
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.589.808	19.998.600	51,82
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.581.553.523	8.583.642.260	89,59
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.346.213.523	8.399.602.260	89,87
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	235.340.000	184.040.000	78,20
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.841.000	35.220.500	26,51
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34.950.000	34.780.500	99,52
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	97.891.000	440.000	0,45
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.199.433	350.348.346	87,11
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.883.000	32.196.145	95,02
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.936.700	33.602.475	68,67
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.750.000	4.548.500	30,84
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.629.733	280.001.226	91,92
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	733.294.000	693.019.815	94,51

1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	733.294.000	693.019.815	94,51
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.980.934.118	2.648.784.019	88,86
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	781.858.998	745.633.495	95,37
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000	134.403.576	74,67
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.019.075.120	1.768.746.948	87,60
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.220.000	258.724.908	76,05
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.450.000	70.270.443	80,35
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.000.000	163.384.565	74,27
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.770.000	25.069.900	76,50
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	203.560.166.909	188.911.596.381	92,80
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.217.477.160	1.043.686.156	85,73
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	17.310.500	2.822.000	16,30
2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	30.458.000	17.015.000	55,86
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	7.990.000	5.160.000	64,58
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.134.008.660	1.003.568.456	88,50
5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	27.710.000	15.120.700	54,57
B	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	128.685.850	121.204.700	94,19
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	56.028.100	52.361.000	93,45
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	33.995.250	31.768.700	93,45
3	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	38.662.500	37.075.000	95,89

C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	173.233.550	162.515.100	93,81
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18.217.100	17.279.500	94,85
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	32.233.000	31.633.000	98,14
3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17.025.000	16.370.000	96,15
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3.140.000	2.354.000	74,97
5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	11.716.000	11.716.000	100,00
6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90.902.450	83.162.600	91,49
D	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	202.001.156.849	187.553.201.925	92,85
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	177.991.965.800	172.914.411.698	97,15
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	14.000.000.000	7.200.264.113	51,43
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	10.009.191.049,00	7.438.526.114	74,32
E	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	39.613.500	30.988.500	78,23
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	39.613.500	30.988.500	78,23
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.063.707.140	816.307.299	76,74
F	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.063.707.140	816.307.299	76,74
1	Penyusunan Standar Harga	1.837.500	1.750.000	95,24
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	605.000	550.000	90,91
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	619.473.000	415.422.400	67,06
4	Penilaian Barang Milik Daerah	177.040.000	151.390.000	85,51
5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	22.472.000	20.790.000	92,52

6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	25.709.000	24.101.200	93,75
7	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	216.570.640	202.303.699	93,41
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.228.805.800	585.209.446	47,62
G	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.228.805.800	585.209.446	47,62
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	73.873.600	17.150.000	23,22
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	230.031.750	32.936.000	14,32
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	194.585.000	17.675.000	9,08
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	230.535.100	125.530.110	54,45
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	58.060.000	-	0,00
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	25.812.000	17.370.000	67,29
7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	10.423.000	8.125.000	77,95
8	Penagihan Pajak Daerah	315.997.350	294.733.686	93,27
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	79.488.000	71.689.650	90,19
9	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10.000.000	-	0,00
	JUMLAH	220.143.049.131,00	202.926.506.672	92,18

Sumber : SIPD Penatausahaan

Badan Pengelola Keuangan Daerah mengampu 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan dengan pagu belanja sebesar Rp 220.143.049.131 Pada Tahun 2025 realisasi belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar 202.926.506.672* atau sebesar 92,18%*, dimana pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai 92,80%*, Program Pengelolaan BMD 76,74%*, Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 88,26%* dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah mencapai 47,62%*.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan semua sasaran strategis tercapai
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya Komitmen Antara Eksekutif dan Legislatif dalam percepatan penyusunan APBD
 - b. SDM Pengelola Keuangan pada PD Belum Maksimal dalam Memahami Aturan Pencairan Dana (Contoh dalam Pengelolaan Data Gaji)
 - c. Keterlambatan dalam Pengiriman Laporan Realisasi Penggunaan Dana ke Pusat

- d. Anggaran Kas tidak proposional dan tidak Sesuai dengan Rencana Kegiatan
- e. Masih Kurangnya Sosialisasi tentang Azas Penatausahaan Keuangan
- f. Manajemen Kas Kurang Maksimal
- g. Belum Mempedomani Ketentuan Perundang-undangan terbaru
- h. Adanya Temuan yang Tidak Ditindaklanjuti
- i. Belum Terintegrasinya Proses Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan
- j. Tingkat Kepatuhan PD dalam Menyampaikan Laporan Aset Kurang
- k. Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Kurang Optimal oleh PD Sebagai Pengguna Barang
- l. Belum Optimalnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berorientasi Pelayanan yang Berbasis Kinerja
- m. Banyak Objek Pajak yang Belum Terdata
- n. Belum maksimalnya pemungutan PAD

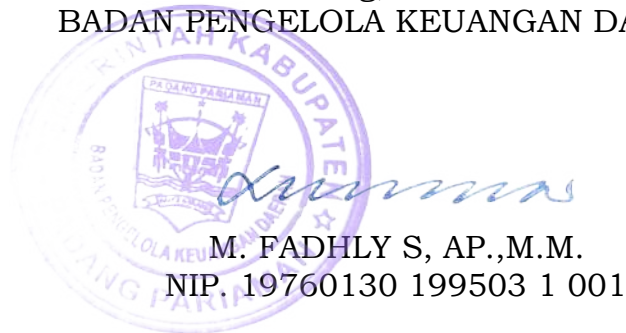
Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan secara terperinci
- 2. Perlunya Peningkatan Pembinaan SDM Terkait Penatausahaan Keuangan
- 3. Perlu adanya komitmen Kepala PD dengan Kepala Daerah, Perlunya Pembinaan dan Peningkatan SDM terkait Penyusunan Laporan Keuangan
- 4. Percepatan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Penyusunan LKPD oleh seluruh SKPD
- 5. Meningkatkan Kualitas Rekon Aset dan Melaksanakan Bimtek
- 6. Inventarisasi BMD berkala

7. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta Peningkatan Database Pajak Secara Online
8. Meningkatkan Agreement terkait Optimalisasi Kinerja secara Akuntabel
9. Penyesuaian dengan Perpres dan regulasi terkait

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Parit Malintang, 14 Januari 2026
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



M. FADHLY S, AP.,M.M.
NIP. 19760130 199503 1 001

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TASLIM LETER, SE.Ak
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Revisi) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parit Malintang, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,



SUHATRI BUR

Pihak Pertama,



TASLIM LETER, SE.Ak
NIP. 19740715 200212 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Jabatan : Kepala Badan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	0
2	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (RMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Pengelolaan RMD	0
3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Salap Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektori	89,70 (A)
4	Meningkatkan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	7

Program	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 205.930.720.853,00	APBD
2 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 960.944.900,00	APBD
3 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.749.727.146,20	APBD
4 Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3.767.501.000,00	APBD
JUMLAH	Rp 231.408.896.799,20	

Parit Malintang, 02 Januari 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman.

Bupati Padang Pariaman,



SUHATRI BUR



TASLIM LETER, SE.Ak
NIP. 19740715 200212 1 011

Lampiran II Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. FADHLY S. AP. M.M
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEEDY AZIS
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

- Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Revisi) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
- Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil kuesioner publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
- Mengembangkan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektori Daerah.
- Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
- Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
- Terapainya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara akurat, terapan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.

Pihak kedua :

- Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
- Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Parit Malintang, 23 Oktober 2025
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



JOHN KENEEDY AZIS

Pihak Pertama,



M. FADHLY S. AP. M.M
NIP. 19760130 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Jabatan : Kepala Badan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan APBD	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	94,23%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Asset Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,00 (Angka)
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai ASIP Perangkat Daerah	80,70 (A)
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Penerimaan PAD terhadap Target	91,18%
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDJB	0,51%

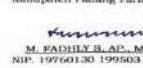
Program	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 198.992.160.909,00	APBD
2 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.003.707.140,00	APBD
3 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.290.309.282,00	APBD
4 Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.228.805.800,00	APBD
JUMLAH	Rp 215.543.095.131,00	

Parit Malintang, 23 Oktober 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman.

Bupati Padang Pariaman,



JOHN KENEEDY AZIS



M. FADHLY S. AP. M.M
NIP. 19760130 199503 1 001

Paraf Verifikasi

Ka. Bapelbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

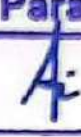
Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	